



**SAMBUT HKN,**  
**DINKES KALTIM IMBAU MASYARAKAT**  
**BUDAYAKAN HIDUP SEHAT**



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KESEHATAN**

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M,PP  
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si  
PJ GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS  
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Dinkes Kaltim akan gelar kegiatan peringatan HKN. (istimewa)

## SAMBUT HKN, DINKES KALTIM IMBAU MASYARAKAT BUDAYAKAN HIDUP SEHAT

**SAMARINDA-** Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) akan menggelar kegiatan untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada 12 November mendatang.

Agenda tersebut merupakan bentuk upaya Dinkes Kaltim untuk menggalakan budaya hidup sehat masyarakat, dan di lingkungan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Gaya hidup sehat bisa mencegah beberapa penyakit yang tinggi resiko kematian seperti penyakit stroke, diabetes, dan jantung," kata Kepala Dinkes Kaltim Dr Jaya Muallimin, Rabu (25/10/2023).

Untuk kegiatan HKN akan ada senam,

jalan sehat, dan beberapa kegiatan lainnya.

"Konsen kami ingin mengimbau, bagaimana kita memiliki hidup yang sehat agar tidak terkena penyakit stroke, diabetes, dan jantung," ujarnya.

Lebih lanjut, di kalangan ASN yang sudah jelas data non fit yang begitu tingginya, maka harus membangun budaya olahraga.

"Gaya hidup sehat dimulai dari makanan, dan kebiasaan sehari-hari misalnya memulai dengan senam pagi, jalan sehat, agar terhindar dari penyakit yang tinggi resiko kematian," pungkasnya. **(ADV/nta)**

**Pewarta : Ernit**

**Editor : Nicha Ratnasari**





PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KESEHATAN**

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



**Dra. Sri Wahyuni MPP**  
SEKDA PROV. KALTIM

**Dr. Akmal Malik, M.Si**  
PG GUBERNUR KALTIM

**dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS**  
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Rumah Sakit Mata Kaltim sudah berjalan bertahap

## **RS MATA KALTIM KANTONGI IZIN OPERASIONAL, DINKES KALTIM KOLABORASI RS MATA DI BANDUNG**

**SAMARINDA-** Gedung Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Jalan M Yamin Kota Samarinda, dibangun berkonstruksi 5 lantai. Rumah Sakit Mata tersebut telah diresmikan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor pada Juni 2023, perlahan beroperasi dengan melengkapi berbagai sarana prasarana guna melayani masyarakat.

Rumah Sakit itu terdiri dari Unit Gawat Darurat (UGD), pelayanan rawat jalan, rawat inap dan ruang operasi serta perkantoran di lahan seluas 6.000 meter persegi.

Dinas Kesehatan Kaltim kini terus melakukan monitoring RS Mata dan memberikan berbagai dukungan. Surat izin operasional juga sudah terbit dari Pemerintah Kota Samarinda.

"Rumah Sakit Mata telah berjalan, sebagian besar sudah pindah bertahap, termasuk izin operasional yang baru juga sudah terbit dari Pemkot Samarinda," kata Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, Jumat (27/10/2023).

Lebih lanjut, guna pemenuhan tenaga medis, Dinkes Kaltim melakukan kerjasama Rumah Sakit Mata di Bandung. Termasuk, tinda-

kan medis yang belum bisa dilaksanakan di rumah sakit ini.

"Ada kegiatan yang belum bisa dilaksanakan maka kita meminta dukungan dari Rumah Sakit Mata Pusat di Bandung," ujarnya.

Pembangunan Rumah Sakit Mata dilengkapi fasilitas modern juga merupakan sarana kesehatan khusus pelayanan kesehatan mata untuk wilayah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kemudian, pihaknya terus memberikan dukungan operasional berbagai rumah sakit di bawah naungan Dinkes Kaltim. Terbaru, RSUD Salehuddin 2 yang diupayakan segera bisa beroperasi 100 persen.

"Kita terus mendukung dari bidang program, SDM, fasilitas alat kesehatan, serta anggaran. Untuk RSUD Salehuddin 2 itu, gedungnya belum bisa dipakai walau sudah diresmikan Pak Gubernur. Jadi, kita masih di gedung yang lama, jika sudah diserahkan artinya 100 persen berarti bisa operasional," pungkasnya. **(ADV/nta)**

**Pewarta : Ernit**

**Editor : Nicha Ratnasari**



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KESEHATAN**

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP  
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si  
PJ GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS  
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Suasana pelatihan dengan tema kejiwaan pasien usia lanjut.

## Nakes & Dokter Wajib Pahami Kondisi Pasien Lansia

**SAMARINDA** - Kondisi kejiwaan pasien lanjut usia (lansia) wajib menjadi perhatian khusus. Salah satunya, depresi dan demensia adalah hal yang paling sering ditemui.

Item itu menjadi salah satu topik bahasan dalam Pelatihan Kesehatan Geriatri bagi Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Kaltim 2023 Angkatan II dan III.

"Pelayanan kesehatan jiwa dan intelegensia pada usia lanjut lebih kepada pelayanan dengan pendekatan yang lebih intensif dengan pertanyaan dengan konsep diskusi yang lebih menenangkan pasien," dr. Eka Yuni Nugrahayu, Sp.KJ dari Rumah Sakit Atma Husada.

Diuraikan, pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana kondisi kehidupannya, kondisi semangat, tingkat kebahagiaan, permasalahan dan bagaimana kemampuan pasien saat ini, dilakukan dengan

teknis yang tepat agar bisa menumbuhkan rasa nyaman pasien.

Menurutnya, kondisi depresi adalah hal paling sering ditemui. Untuk pasien depresi, cara dokter atau nakes berkomunikasi harus bisa memancing, pasien untuk lebih semangat.

"Bagaimana pembawaan dokter dan nakes sangat memengaruhi kondisi pasien saat ditanya terkait kondisinya," katanya. Apalagi kondisi pasien depresi sangat rentan dan sangat sensitif. Proses mengorek informasi juga harus lebih detailing. Untuk bisa mendapatkan kondisi ideal dalam proses itu, ada sesi latihan bagi seluruh peserta yang dibagi dalam beberapa kelompok.

"Tujuannya untuk mendapatkan kondisi ideal saat proses memahami kondisi pasien," ucapnya lagi. (Rs1/adv/dinkes)

**Pewarta : Adhi Abdhian**  
**Editor : Nicha Ratnasari**



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KESEHATAN**

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni MPP  
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si  
P2 GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Muallim, Sp.KJ, M.Kes, MARS  
KEBILA DINAS KESEHATAN KALTIM



Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltim, Fitnawati. (adhi/mediakaltim)

## LAYANAN LANJUT USIA BUTUH RUANGAN KHUSUS DI PUSKESMAS

**SAMARINDA** – Hal menarik terkait bagaimana pelayanan kesehatan pada usia lanjut disampaikan oleh Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltim, Fitnawati pada Pelatihan Kesehatan Geriatri bagi Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Angkatan II dan III Tahun 2023 di meeting room Horison Hotel lantai III, Senin (18/9/2023).

Tak bisa dimungkiri, para lanjut usia masih banyak terikat pada kegiatan-kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan kemampuan, minat dan kondisi kesehatannya.

Untuk mengimbangnya, pelayanan lanjut usia di Puskesmas diupayakan secara lintas disiplin dan lintas sektor. Artinya, pelayanan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan gender dan kesamaan hak.

Hal ini sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 TA.2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas bahwa sasaran pada kebijakan tersebut adalah pra lanjut usia (45-59 tahun), lanjut usia (60 tahun), lanjut usia risiko tinggi (lanjut usia 70 tahun atau Lanjut Usia dengan masalah kesehatan), keluarga, masyarakat tempat Lanjut Usia berada serta sasaran tidak langsung yaitu masyarakat luas, organisasi sosial, petugas kesehatan, maupun Ibu Hamil, Bayi dan Balita, Usia Sekolah, Remaja dan Usia Subur.

“Untuk itu, pelayanan kepada lanjut usia yang datang ke Puskesmas, sebaiknya diberikan ruangan khusus supaya tidak harus mengantre bersama dengan pasien umum lainnya,” katanya. Tapi, apabila kondisi Puskesmas tidak memungkinkan, dapat

dilakukan diruangan pemeriksaan umum dengan syarat pasien lanjut usia harus didahulukan.

“Prinsip layanan pasien lanjut usia di Puskesmas adalah berdasarkan hasil pengkajian paripurna geriatri,” sebutnya. Lanjut usia yang sehat adalah lanjut usia berdasarkan hasil pengkajian paripurna geriatri masuk dalam kategori kelompok 1 dan 2 yaitu lanjut usia yang bebas dari ketergantungan kepada orang lain atau tergantung pada orang lain tapi sangat sedikit, atau mempunyai penyakit yang terkontrol dengan kondisi medik yang baik.

“Ingat, tidak semua pasien geriatri harus dirujuk ke RS, ada kasus-kasus pasien geriatri sebenarnya masih bisa ditangani di Puskesmas,” pesannya. (rs1/adv/dinkes).

**Pewarta : Adhi Abdian**  
**Editor : Nicha Ratnasari**





Foto bersama peserta pelatihan Pelayanan Kesehatan Geriatri Tenaga Kesehatan Tingkat Kaltim. (adhi/mediakaltim)

## DINKES KALTIM GELAR PELATIHAN PELAYANAN KESEHATAN GERIATRI UNTUK NAKES

**SAMARINDA** – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim menggelar Pelatihan Pelayanan Kesehatan Geriatri bagi Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Angkatan II dan III Tahun 2023 di meeting room Horison Hotel lantai III pada Selasa (19/9/2023).

Pelatihan yang menghadirkan perwakilan Puskesmas se-Kaltim ini, diisi oleh pemateri dari tim fasilitator Pelayanan Kesehatan Geriatri seperti, dr. Santy Sijabat, Sp.PD, dr. Muhibuddin Perwira Negara dan dr. Sp.KJ (RS AHM). Kemudian ada dari PDGKI Cabang Kaltim, PDGI Wilayah Kaltim dan perwakilan PPNI Provinsi Kaltim

Hadir juga dalam sesi pembukaan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Kaltim, dan Master of Training (MoT) dari UPTD Bapelkes Provinsi Kaltim

Pelatihan ini merupakan bentuk komitmen Dinkes Kaltim da-

lam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan Lanjut Usia untuk mencapai Lanjut Usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat.

“Lanjut Usia adalah masalah kesehatan sehingga diperlukan pembinaan kesehatan pada kelompok Pra Lanjut Usia dan Lanjut Usia,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ., M. Kes., MARS melalui Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltim, Fitnawati.

“Melalui kegiatan pelatihan ini baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas yang merupakan unit terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat maupun perorangan diharapkan mampu melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tingkat dasar bagi lanjut usia, paparnya.

Lebih detail, ia mengurai tujuan pelaksanaan pelatihan agar

meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan santun lanjut usia, meningkatnya koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat dan pihak terkait lainnya. Selain itu, lanjut dia, meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lanjut usia, dan meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga serta lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat

“Prinsip pelayanan kesehatan Lanjut Usia yaitu menjadi Lanjut Usia sehat adalah hak asasi setiap manusia. Artinya, pelayanan kesehatan primer adalah ujung tombak untuk tercapainya Lanjut Usia sehat yang didukung oleh pelayanan rujukan yang berkualitas atas partisipasi Lanjut Usia,” pungkasnya. (rs/adv/dinkes)

**Pewarta : Adhi Abdian**  
**Editor : Nicha Ratnasari**



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KESEHATAN**

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



**Dra. Sri Wahyuni MPP**  
SEKDA PROV. KALTIM

**Dr. Akmal Malik, M.Si**  
PD GUBERNUR KALTIM

**dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS**  
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Dalam pertemuan monitoring dihadiri oleh 62 orang terdiri dari dinas dan DPPM. (Istimewa)

## Keterlibatan Fasyankes Penting dalam Percepatan Layanan TB

**BALIKPAPAN-** Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini. Menurut WHO dalam Global TB Report tahun 2022, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai penyumbang penderita TBC terbanyak setelah India perkiraan sebesar 969.000 kasus.

Dibahas dalam pertemuan Monitoring dan Evaluasi Public Private Mix (PPM) tingkat provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada 25-27 September 2023.

Berdasarkan hasil capaian program tuberkulosis (TBC) di Indonesia hingga Desember tahun 2022 menunjukkan angka di bawah target program nasional.

Jumlah kasus yang diobati dan dilaporkan ke SITB tahun 2022 sebanyak 643.598 kasus dengan cakupan penemuan pengobatan sebesar 66,4 persen (target 90 persen) dan presentase keber-

hasilan pengobatan TBC sebesar 82,9 persen (target 90%).

Sementara di Kaltim di tahun 2022 penemuan dan pengobatan TBC baru mencapai 55,6 persen dari target eliminasi kasus yang harus ditemukan sebanyak 14,442 kasus, dan treatment success rate baru mencapai 86,9 persen dengan kontribusi pelibatan fasyankes terbesar pada fasyankes pemerintah 80,2 persen, sedangkan fasyankes swasta dalam pelaporan kasus TBC untuk Rumah Sakit swasta 16,5 persen dan Klinik Swasta 0,3 persen. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang besar bagi daerah dalam upaya pencapaian eliminasi di tahun 2030.

"Di Kaltim sendiri 9 kabupaten/kota yang sudah terbentuk tim DPPM, namun baru 2 kabupaten/kota yang telah aktif. Dan merupakan kabupaten/kota PPM

yakni Kota Samarinda dan Kota Balikpapan," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Dr. Jaya Mualimin, pada Senin (25/9/2023).

Penguatan jejaring layanan dengan melibatkan fasyankes pemerintah maupun swasta (Publik-Private Mix/PPM) sangat diperlukan. District-based Public Private Mix (DPPM) merupakan jejaring layanan TB antara layanan TB antara fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta disuatu kabupaten/kota dibawah kordinasi Dinas Kesehatan setempat.

"Sehingga kegiatan ini dalam rangka evaluasi dan percepatan peningkatan keterlibatan fasyankes dalam jejaring PPM Kaltim, maka dilakukan pertemuan monitoring," tutupnya.

**(nta/adv/dinkes)**

**Pewarta : Nita**

**Editor : Nicha Ratnasari**





PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KESEHATAN**

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP  
SEKDA PRONV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si  
PG GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS  
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Diresmikan oleh Gubernur Kaltim, Kadis Dinkes Kaltim, dan beberapa jajaran lainnya. (Diskominfo Kaltim)

## RSUD KORPRI KALTIM BERBASIS NASIONAL AKAN BEROPERASI TAHUN 2024

**SAMARINDA-** Gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Korpri Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) atau RSUD Aji Muhammad Salehuddin II, yang berada di Jalan Wahid Hasyim I, Kota Samarinda.L, diresmikan langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor.

Direktur RSUD Korpri Kaltim, Dokter E Harleni Aroma, menuturkan bahwa pihaknya masih melakukan persiapan terkait dengan prasarana dan administrasi rumah sakit.

"Kami harus berbenah dulu artinya melengkapi dulu prasarana yang ada, supaya nanti tidak kerja dua kali dan semua sudah lengkap. Kami masih menunggu persyaratan administrasinya selesai," kata Harleni, pada Selasa (26/9/2023).

Ia juga menjelaskan, RSUD Korpri Kaltim akan menjadi rumah sakit khusus dengan beberapa pelayanan unggulan, sesuai

dengan permintaan dari Kementerian Kesehatan.

"Unggulan yang diminta adalah terkait dengan pelayanan cuci darah, selanjutnya kamu akan memenuhi beberapa pelayanan unggulan yang memang diminta oleh kementerian kesehatan salah satunya untuk menjadi RS Ibu dan Anak," ujarnya.

Lebih lanjut, RSUD Korpri Kaltim dipersiapkan menjadi rujukan nasional untuk wilayah Indonesia, Kalimantan Timur khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kemudian, RSUD Korpri Kaltim akan beroperasi pada tahun 2024 mendatang.

Selain itu juga, RSUD Korpri akan menyediakan klinik rawat jalan yang lengkap, termasuk klinik kulit, THT, dan penunjang kelahiran.

Kendati demikian, katanya rumah sakit Korpri tetap akan

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat.

"Kita ini bertahap untuk setiap kegiatan rumah sakit, termasuk kegiatan akreditasi atau kenaikan kelas dan perubahan nama rumah sakit semua didaftarkan ke Kemenkes dan sudah di proses dari sekarang," tutupnya.

Terlepas itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Muallimin menyatakan, sangat menyambut baik jika di Kaltim memiliki rumah sakit dengan pelayanan unggulan.

"Apalagi pelayanan untuk cuci darah, THT, dan lainnya. Kami sangat mengapresiasi RSUD Korpri Kaltim ini, semoga jika telah beroperasi bisa memberikan pelayanan terbaik," tutupnya. **(Adv)**

**Pewarta : Nit  
Editor : Nicha Ratnasari**





PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KESEHATAN**

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni MPP  
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si  
P2 GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS  
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Usai hadir acara peresmian Jaya Muallimin jelaskan progam SKI. (Nita/mediakaltim)

## 260 PETUGAS SURVEI SKI DIKERAHKAN, JAYA MINTA MASYARAKAT TIDAK PALSUKAN TERKAIT KESEHATAN

**SAMARINDA-** Dinas Kesehatan (Dinkes) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) turut menyukseskan pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di tahun 2023.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Muallimin mengatakan SKI dimulai sejak tanggal 8 Agustus berakhir pada 6 Oktober 2023.

"Tujuan dari adanya SKI ini adalah gabungan survei untuk mengukur kesehatan masyarakat Kaltim. Dilakukan pengambilan darah, dan melihat karakteristik apa saja dalam kurun waktu 10 tahun masyarakat mempunyai resiko penyakit apa," jelas Kepala Dinkes Kaltim Jaya Muallimin, Pada Selasa (26/9/2023).

Menurut informasi, peran aktif dari Dinkes Kaltim ialah dengan cara memberikan data yang benar saat petugas survei mendatangi rumah warga untuk melakukan pendataan.

"Jadi masyarakat yang didatangi kerumah itu jangan menolak. Harus membantu petugas survei dalam proses pemeriksaan dan

pendataan," ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, warga cukup mengumpulkan Kartu Keluarga (KK). Setiap Kabupaten/Kota ada sekitar 70 sampel darah untuk pemeriksaan.

"Dari laporan SKI hingga saat ini baru 50 persen hasil survei. Dan untuk responden dari masyarakat sekarang sudah terkumpul 700 sampel darah hasil pemeriksaan," bebernya.

Jaya juga menjelaskan sekitar 260 petugas survei telah dilatih oleh Kementerian Kesehatan pada akhir Agustus 2023. Para petugas itu akan terlibat dalam SKI di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim.

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerima kunjungan petugas dan memberikan informasi yang sesuai serta tidak membuat data palsu terkait kesehatan mereka," tutupnya. **(Adv)**

**Pewarta : Nita**

**Editor : Nicha Ratnasari**



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KESEHATAN**

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M,PP  
SEKDA PROV KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si  
PU GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS  
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Posyandu bisa menjadi sarana intervensi dini. (Istimewa)

## OPTIMALKAN PELAYANAN PADA BAYI, BALITA, & LANSIA

**SAMARINDA-** Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menggodok pos pelayanan terpadu (posyandu) agar bisa melayani orang yang telah lanjut usia (lansia), di samping memaksimalkan penanganan terhadap pertumbuhan balita dalam program menelan atau mencegah stunting.

"Hal ini berarti layanan di Posyandu akan lebih fokus pada pengawalan siklus kehidupan, di mana lansia, remaja, bayi, dan balita akan mendapatkan layanan yang terintegrasi dalam satu tempat," jelas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltim Fitnawati, melalui sambungan telepon, pada Selasa (26/9/2023).

Dijelaskannya, dengan adanya integrasi tersebut, Dinkes Kaltim berharap keluarga yang memiliki bayi atau balita, dan lansia dapat membawa ke posyandu sekitar.

"Tujuannya adalah untuk meningkatkan penanganan terhadap penyakit tidak menular dan mengupayakan kesehatan dan produktivitas kepada lansia," bebernya.

Fitnawati juga berharap, adanya layanan integrasi, Dinkes Kaltim dapat memberikan perhatian yang holistik terhadap kesehatan masyarakat, termasuk pertumbuhan balita dan penanganan kesehatan semua fase usia.

"Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memaksimalkan upaya pencegahan stunting pada balita dan meningkatkan kesehatan serta kualitas hidup lansia," imbuhnya.

Dikemukakannya, dalam pengawasan posyandu bukan hanya melibatkan Dinkes Kaltim, tetapi juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) serta dinas lain yang saling terkait.

Menurutnya juga, salah satu indikator penting yang dipantau dalam posyandu adalah pertumbuhan bayi. Pemantauan pertumbuhan balita saat ini sekitar 40 persen, namun harapannya adalah mencapai 90 persen.

"Dengan memantau pertumbuhan bayi, kita dapat mengetahui jika gangguan gizi dan melakukan intervensi sejak dini," serunya.

Fitnawati turut menambahkan, jika pertumbuhan bayi tidak mengalami kenaikan, pada saat pemeriksaan kedua kali, mereka harus dirujuk. Jika ada indikasi masalah gizi, sudah cukup dengan satu kali pemeriksaan, masa segera merujuk bayi tersebut.

"Dengan begitu, petugas kesehatan dapat segera menangani masalah gizi sejak dini," pungkasnya. (Adv)

**Pewartu : Nita**

**Editor : Nicha Ratnasari**